



Ketika Pasak Lebih Besar daripada Tiang: Luasnya Cakupan Otoritas serta Dampaknya terhadap Profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia

Oleh

Firman Noor¹, Sarah Nuraini Siregar²

¹Peneliti senior di Pusat Penelitian Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional

²Peneliti di Pusat Penelitian Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹firman.noor@yahoo.com, ²nurainisarah30@gmail.com

Latar Belakang

Saat ini, perhatian publik dan kritik dari berbagai kalangan terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan kinerja kepolisian yang jauh dari apa yang diharapkan. Terlebih lagi, pada era reformasi, berbagai inisiasi penataan terkait dengan bidang keamanan sedang dilakukan menuju profesionalisme Polri. Namun demikian, harapan tersebut jauh dari kata ideal karena munculnya berbagai permasalahan yang mengaitkan Polri dengan kasus kekerasan, korupsi, isu politisasi, hingga penanganan kasus pidana.

Alhasil, kritik yang ditujukan pada pihak kepolisian tersebut ditandai dengan beredarnya tagar #percumalaporpolisi sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian saat ini. Penyebab kemunculan tagar ini bermula dari dirilisnya Proyek Multatuli terkait dengan penghentian penyidikan kasus pemerkosaan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.¹ Selain itu, berbagai kasus yang melibatkan anggota Polri memperlihatkan kinerja Polri yang masih jauh dari kata profesional. Diantaranya kasus pelapor atau korban yang menjadi tersangka, penganiayaan terhadap sesama anggota maupun masyarakat, dan kekerasan dalam mengamankan para demonstran.²

Kapolri bertindak cepat sebagai bentuk respon kelembagaan atas kritikan tersebut. Kapolri mencopot jabatan dan melakukan mutasi pada jajaran pimpinan sebagai akibat dari maraknya fenomena yang berpotensi memperburuk citra polisi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Walaupun demikian,



kepercayaan publik dalam beberapa survei yang terbangun saat ini akan menjadi bumerang bagi Polri. Beberapa hasil survei menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Polri, tepatnya pada saat peringatan hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 2021. Beberapa lembaga survei yang berkontribusi seperti: Alvara Strategic Indonesia, Charta Politika, dan Cyrus Network. Lembaga-lembaga survei tersebut telah mencatat tingkat kepercayaan masyarakat dengan rata-rata sebesar 80%.³ Namun, pada bulan Agustus 2021, rilis survei KedaiKopi menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebesar 66,3%.⁴ Hasil survei berikutnya oleh lembaga *Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)* pada bulan Oktober 2021 bahkan menunjukkan penurunan hingga 58%.⁵

Oleh karena itu, kritikan dan penelaahan publik terhadap kinerja Polri mencerminkan semakin lemahnya tingkat profesionalitas seorang polisi, yang dianalogikan seperti puncak gunung es di tengah-tengah situasi Polri saat ini. Argumen utamanya terletak pada anggapan bahwa Polri telah menerima pelimpahan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi inti dan profesionalitas kepolisian.

Analisis

Secara umum, kompetensi inti kepolisian meliputi pencegahan kejahatan, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Akan tetapi, saat ini Polri telah menangani berbagai kasus yang seharusnya sudah menjadi tugas dan wewenang dari institusi lain. Situasi kompleks seperti ini telah membedakan kinerja Polri pada era sebelumnya. Seperti yang terjadi di Era Orde Baru dimana Polri yang dianggap sebagai "adik bungsu" memiliki peran yang terbatas, sehingga tidak jarang kewenangan Polri diambil alih oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Saat ini Polri telah menjelma menjadi lembaga yang diberikan berbagai kewenangan dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Ditambah lagi, dukungan dana serta kepentingan penguasa di lembaga ini yang menciptakan persepsi Polri sebagai "anak emas".⁶

Dalam eksekusi tugasnya, Polri berada dalam lingkaran abu-abu yang kewenangannya sangat potensial dalam situasi apapun (*omnipotent*) dan dimanapun (*omnipresent*). Hal ini dikarenakan tugas pengamanan Polri sangat luas cakupannya, mulai dari pengamanan lingkungan masyarakat, lalu lintas, pemilu, hingga objek vital nasional. Selain hal tersebut, Polri juga berperan dalam mengatasi gangguan keamanan dalam negeri seperti: terorisme, konflik separatis, serta hal-hal horizontal yang berbasis primordialisme. Penugasan tersebut juga bersamaan dengan tanggung jawab Polri dalam membina masyarakat untuk mencegah kejahatan di lingkungan sekitarnya.





Penugasan yang diemban oleh Polri semakin menumpuk pada masa pandemi COVID-19. Polri wajib menegakkan berbagai protokol kesehatan, dimulai dari pengendalian mobilitas masyarakat, penggunaan masker, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu, Polri juga melakukan pelacakan kasus (*tracing*) penularan dan penyuluhan mengenai COVID-19, serta mendistribusikan program vaksinasi kepada masyarakat. Tidak dapat dibayangkan beban tugas yang begitu besar yang dilakukan secara bersamaan dengan tugas pokok Polri lainnya. Maka dari itu, Polri juga dapat digambarkan sebagai sosok yang mengampu tanggung jawab yang luas serta kompleks. Hal ini justru dapat mengakibatkan terkurasnya tenaga Polri, yang tidak jarang juga meningkatkan emosi seorang anggota Polri sehingga berimplikasi buruk terhadap kinerja lembaga ini.

Situasi kompleks ini semakin buruk sebagai akibat dari kapasitas SDM Polri yang kurang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, terlihat dengan jelas bahwa perilaku anggota Polri belum dapat mencerminkan sikap ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku. Beberapa kasus seperti penganiayaan pimpinan terhadap anggotanya, penembakan sesama rekan, hingga kekerasan pada demonstran dengan menyerang para pengunjuk rasa (mahasiswa). Sedangkan dari segi kuantitas, rasio polisi terhadap penduduk di Indonesia adalah 1:>1.000; padahal rasio ideal bagi Indonesia adalah 1:400.⁷ Dengan jumlah anggota yang kurang memadai, disertai dengan berbagai wewenang, pekerjaan, dan tanggung jawab yang beragam, signifikansi kinerja Polri selama ini kurang optimal. Ditambah lagi dengan kondisi tidak terduga yang memperburuk citra Polri. Kondisi Polri saat ini seperti analogi dalam peribahasa Indonesia yang berbunyi “besar pasak daripada tiang”.

Selain itu, perspektif terhadap Polri saat ini berdampak pada peningkatan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Polisi juga berperan dalam kehidupan politik praktis, yang mana akhir-akhir ini Polri telah menjadi bagian dari elemen pendukung rezim. Keterlibatan Polri sebagai pendukung penguasa tercermin dalam momentum kontestasi pemilu (Pilkada dan Pemilihan Umum). Misalnya menjelang pelaksanaan pemilihan umum presiden dan kepala daerah, Polri melakukan banyak kegiatan dimulai dari membangun interaksi dengan tokoh masyarakat⁸ hingga pendataan dukungan masyarakat sebagai peserta.⁹ Alhasil, tugas-tugas tersebut tidak sejalan dengan peran dan fungsi institusi kepolisian.

Selain itu, Polri juga menangani pihak oposisi atau mereka yang kritis terhadap pemerintah. Walaupun demikian, penanganan ini seringkali dinilai berlebihan. Survei yang dilakukan oleh Politik Indonesia menunjukkan bahwa 57,7% responden menganggap bahwa polisi telah bertindak sewenang-wenang





dalam menangkap warga yang pandangan politiknya berbeda dengan rezim penguasa.¹⁰ Fenomena ini telah menunjukkan bahwa negara menghadapi kelompok oposisi di tingkat masyarakat dengan memanfaatkan peran polisi. Termasuk diantaranya beberapa kritikus pemerintah ditangkap, dituntut, ataupun dihukum karena komentar publik mereka.¹¹

Kesimpulan

Fenomena tersebut memperkuat penilaian terhadap kinerja Polri yang sangat menurun serta jauh dari prinsip profesionalisme dan demokrasi. Oleh sebab itu, kondisi yang tidak diharapkan ini didorong untuk segera diatasi. Jika tidak, Polri akan mendapatkan lebih banyak hambatan dalam menjalankan tugas pokok, serta mengimplementasikan kompetensi inti dari pihak kepolisian. Situasi ini tentunya akan membahayakan tidak hanya bagi para pelaku sektor keamanan, tetapi juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami merekomendasikan bahwa kunci utama penyelesaian masalah ini adalah mengembalikan Polri sebagai lembaga profesional yang memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensi intinya. Namun demikian, kemungkinan kendala utama yang akan kembali pada persepsi penguasa dan elit sipil dalam merumuskan kebijakan terkait fungsi dan wewenang Polri. Oleh sebab itu, revisi atau bahkan penambahan regulasi untuk menjaga profesionalisme Polri menjadi prasyarat yang mendesak saat ini.





Endnotes

- 1 <https://projectmultatuli.org/kasus-pencabulan-anak-di-luwu-timur-polisi-membela-pemerksa-dan-menghentikan-penyelidikan/>.
- 2 <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/27/063000965/10-kasus-yang-melibatkan-polisi-dan-menjadi-perhatian-publik?page=all>.
- 3 <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/01/kapolri-beberkan-capaian-kinerja-polri-di-hari-bhayangkara-ke-75>.
- 4 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/survei-kepercayaan-terhadap-polri-terendah-dibandingkan-penegak-hukum-lainnya>.
- 5 <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6177986172479/bahaya-erosi-kepercayaan-publik-terhadap-polisi>.
- 6 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630152231-12-519093/polri-anak-emas-reformasi-dengan-anggaran-tambun>
- 7 <https://jogja.tribunnews.com/2019/11/26/pakar-sebut-rasio-polisi-dan-masyarakat-tinggi>.
- 8 <https://rri.co.id/bandung/politik/politik-dan-parlemen/658906/jaga-stabilitas-kamtibmas-pemilu-polda-jabar-gelar-silaturahmi-akbar-dengan-tokoh-lintas-agama>
- 9 <https://news.detik.com/berita/d-4487710/tonton-sekarang-polisi-mendata-pendukung-01-dan-02>.
- 10 <https://www.liputan6.com/news/read/4391541/survei-indikator-tunjukkan-meningkatnya-ancaman-kebebasan-sipil-di-indonesia>.
- 11 Ahmad Dhani dipenjara karena tweet “idiot” di tagar #2019GantiPresiden yang dinilai sebagai ujaran kebencian. Eggi Sudjana ditangkap atas tuduhan makar karena pidatonya yang menyerukan kepada masyarakat untuk menggunakan kekuasaan rakyat atas kecurangan pemilu. Kivlan Zein dituduh menyebarkan berita palsu dan pengkhianatan, tetapi kejahatan terhadapnya adalah kepemilikan senjata api.



THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by contributors at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The **Habibie Center** was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id